

TESIS

**PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

***THE EFFECT OF THE TOURISM SECTOR ON REGIONAL
FINANCIAL PERFORMANCE WITH ECONOMIC GROWTH
AS A MEDIATING VARIABLE IN IMPROVING
COMMUNITY WELFARE***

**NURUL WAHYUNI
A062191003**



**PRODI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

***THE EFFECT OF THE TOURISM SECTOR ON REGIONAL
FINANCIAL PERFORMANCE WITH ECONOMIC GROWTH
AS A MEDIATING VARIABLE IN IMPROVING
COMMUNITY WELFARE***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar megister

Disusun dan diajukan oleh

NURUL WAHYUNI

A062191003



kepada

**PRODI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Disusun dan diajukan oleh

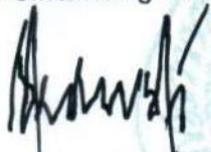
NURUL WAHYUNI

A062191003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Magister Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 3 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



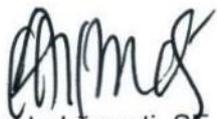
Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196509251990022001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si.
NIP 196503071994031003

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. Aini Indriawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurul Wahyuni
NIM : A062191003
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

THE EFFECT OF THE TOURISM SECTOR ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE WITH ECONOMIC GROWTH AS A MEDIATING VARIABLE IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE

Adalah karya tulisan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2023

Yang membuat menyatakan,



Nurul Wahyuni

PRAKATA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Megister Akuntansi (M.Ak.) pada program Pendidikan Megister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada ibu Prof. Dr. Mediaty, SE.,Ak.,M.Si.,CA dan bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti. Ucapan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,Ca, ibu Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA, bapak Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA. selaku tim penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan demi perbaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, untuk penyempurnaan tesis ini peneliti senantiasa meminta saran dan kritik dari pembaca. Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada keluarga besar saya yang telah membesarkan peneliti dengan cinta, kasih sayang, serta penuh keikhlasan hati yang telah mengiringi, menyemangati serta memotivasi setiap langkah peneliti dengan doa dan restu. Terkhusus untuk kedua orang tua ku tercinta meskipun sekarang Bapak Mama telah tiada dan belum sempat melihatku telah melangkah sejauh ini, tapi percayalah engkau selalu ada di dalam hatiku dalam setiap langkahku. Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Februari 2022



Peneliti

ABSTRAK

NURUL WAHYUNI. *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (dibimbing oleh Mediaty dan Syarifuddin Rasyid).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan; (2) pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi; (3) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan; (4) pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat; (5) pengaruh pertumbuhan ekonomi memediasi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat; (6) pengaruh kinerja keuangan memediasi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Populasi penelitian ini adalah sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan, kesejahteraan masyarakat. Sampel penelitian ini adalah data dari tahun 2010-2020. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; (2) sektor pariwisata berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; (3) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan; (4) kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (5) pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan; (6) kinerja keuangan mampu memediasi pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Sektor Pariwisata, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan masyarakat



ABSTRACT

NURUL WAHYUNI. *The Effect of Tourism Sector on Regional Financial Performance with Economic Growth as a Mediating Variable in Improving Community Welfare* (supervised by Mediaty and Syarifuddin Rasyid)

This study aims to analyze: (1) the effect of the tourism sector on financial performance, (2) the effect of the tourism sector on economic growth, (3) the effect of economic growth on financial performance, (4) the effect of financial performance on community welfare, (5) the effect of economic growth mediating the tourism sector on community welfare, (6) the effect of financial performance mediating the tourism sector on community welfare. This type of research was a quantitative study. The subject of this research was the Government of Bulukumba Regency. The population was the tourism sector, economic growth, financial performance, and community welfare. The sample was data from 2010 to 2020. Data analysis used Partial Least Square (PLS) model. The results show that (1) tourism sector affects financial performance; (2) tourism sector has no effect on economic growth; (3) economic growth has no effect on financial performance; (4) financial performance affects community welfare; (5) economic growth cannot mediate the effect of the tourism sector and financial performance; (6) financial performance is able to mediate the effect of the tourism sector and community welfare.

Keywords: tourism sector, financial performance, economic growth, community welfare



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	11
2.1.1 Teori.....	11
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah	13
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	23
2.1.4 Pariwisata	26
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	37
2.2 Tinjauan Empiris	39
2.2.1 Penelitian Terdahulu	41

BAB III RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	44
3.1 Rerangka Konseptual	44
3.2 Hipotesis	47
BAB IV METODE PENELITIAN.....	56
4.1 Rancangan Penelitian.....	56
4.2 Situs dan Waktu Penelitian	56
4.3 Populasi dan Sampel.....	57
4.4 Jenis dan Sumber Data	57
4.5 Metode Pengumpulan Data	57
4.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	58
4.6.1 Variabel Penelitian.....	58
4.6.2 Defenisi Operasional	59
4.7 Teknik Analisis Data	59
4.7.1 Uji Statistik Deskriptif	59
4.7.2 <i>Patrial Least Square</i>	60
BAB V HASIL PENELITIAN	63
5.1 Deskripsi Data	63
5.1.1 Gambaran Umum Data Sekunder	63
5.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	66
5.2 Analisis Partial Least Square (PLS).....	69
5.2.1 Diagram Jalur.....	69
5.2.2 Evaluasi Model Pengukuran.....	69
5.2.3 Goodnes of Fit Model.....	75
5.2.4 Penujian Hipotesis Secara Langsung.....	77
5.2.5 Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung	78
5.2.6 Pengujian Mediasi.....	79
BAB VI PEMBAHASAN.....	82
6.1 Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Kinerja keuangan.....	82
6.2 Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	83
6.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan .	84
6.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	85
6.5 Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai Variabel Mediasi	86

6.6 Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Mediasi.....	87
BAB VII PENUTUP	89
7.1 Kesimpulan	89
7.2 implikasi.....	90
7.3 keterbatasan	90
7.4 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2
3.1	Rerangka Konseptual.....	47
5.1	Diagram Jalur.....	69
5.2	Diagram Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja keuangan.....	80
5.3	Diagram Mediasi Kinerja Keuangan pada Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan kemampuan Keuangan Daerah	19
2.2 Efektivitas Keuangan Daerah	21
2.3 Efisiensi Keuangan Daerah	22
2.4 Keserasian Belanja Keuangan Daerah	23
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu.....	40
4.1 Definisi Operasional	59
5.1 Pendapatan sektor pariwisata	63
5.2 Kinerja Keuangan	64
5.3 Kesejahteraan masyarakat	65
5.4 Pertumbuhan ekonomi	65
5.5 Analisis Deskriptif variabel penelitian.....	66
5.6 Pengujian Model Formatif	70
5.7 Pengujian Multikolinieritas antar Indikator	71
5.8 Indikator Pengukur variabel Sektor Pariwisata	72
5.9 Indikator Pengukur Variabel Kinerja Keuangan	73
5.10 Indikator Pengukur Kesejahteraan Masyarakat	74
5.11 Hasil Goodness of Fit Model.....	75
5.12 Pengujian Hipotesis Langsung	77
5.13 Pengujian Hipotesis Tidak Langsung.....	78
5.14 Pengujian Mediasi	79
5.15 Pengujian Mediasi Pertumbuhan ekonomi pada pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan	80
5.16 pengujian mediasi kinerja keuangan pada pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Analisis Deskriptif	98
2 Pengukuran Kinerja Keuangan	98
3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi	100
4 Analisis PLS	101
5 Pendapatan Retribusi Pariwisata 2010-2020	104
6 PDRB harga konstan 2010-2020	105
7 IPM 2010-2020	106
8 LRA 2010-2020	107

BAB I

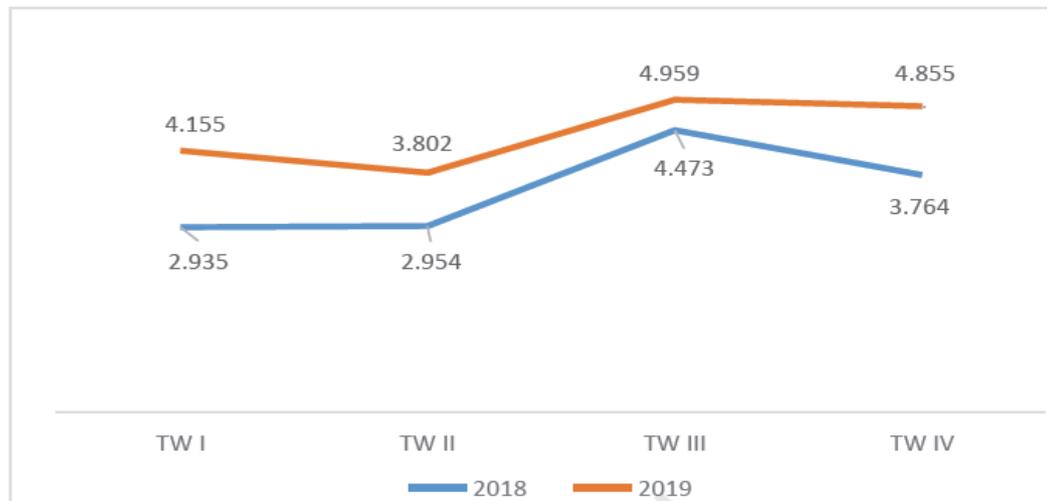
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan alam. Di mana kekayaan alam yang terdapat di Indonesia, tidak terdapat di negara lain. Potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memiliki nilai jual sebagai sumber pendapatan bagi negara, salah satunya pada bidang pariwisata. Menurut Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata memiliki banyak peranan di antaranya memperkenalkan karakteristik suatu bangsa atau daerah yang dikunjungi, mengenalkan kebudayaan adat-istiadat dan memberikan kenikmatan keindahan alam di daerah (Hasan. 2015: 11).

Beberapa provinsi di Indonesia memiliki kekayaan alam yang menjadi sektor pariwisata, salah satunya adalah provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki banyak destinasi wisata diantaranya wisata alam, kearifan lokal, budaya dan sejarah. Destinasi tersebut menjadi daya tarik dan tujuan utama untuk para wisatawan berkunjung ke Sulawesi selatan. Setiap tahun kunjungan pariwisata mengalami peningkatan, khususnya wisatawan mancanegara. Hal ini sesuai dengan data laporan statistika pariwisata provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan rata-rata kunjungan wisatawan mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 14.126 pengunjung sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 17.771 pengunjung.

Data tersebut menunjukkan kenaikan sebanyak 25.8%. kemudian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara setiap negara berbeda dimana wisatawan dari Malaysia sejumlah 10.056 kunjungan, Prancis sejumlah 620 kunjungan, Singapura sejumlah 595, Jerman 595 kunjungan, Amerika Serikat 515 kunjungan. Kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber : Statistik Pariwisata Sul-Sel, 2019

Peningkatan pariwisata tidak terlepas dari peranan berbagai pihak di antaranya pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Mereka memiliki peranan masing-masing dan satu kesatuan yang diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan sektor pariwisata (Hasan. 2015:39). Peningkatan sektor wisata akan berpengaruh terhadap beberapa hal, terutama pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan suatu kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat meningkat (Sukirno, 2013). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor pariwisata, di mana pariwisata menjadi salah satu penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah bahkan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Yakup (2019) menyatakan bahwa pariwisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan

devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Brida, dkk (2010) bahwa pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa jalur yaitu sebagai penghasil devisa untuk mendapatkan barang modal proses produksi, menstimulus investasi dibidang infrakstruktur, pendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi melalui *direct*, *indirect* dan *induced effect*, berkontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (McKinnon, 1964; Sakai, 2006; Spurr, 2006, Lee & Chang, 2008; Weng & Wang, 2004). Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang harus ditingkatkan dikarenakan berdampak pada kinerja keuangan suatu daerah. Nurhayati dan Hamzah (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kinerja keuangan suatu daerah akan semakin baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah mengelola sumber keuangan asal daerah dalam memenuhi kebutuhan untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah dengan batasan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986). Salah satu penunjang utama dalam kinerja keuangan pemerintah daerah adalah pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Setiap daerah memiliki pendapatan yang berbeda-beda yang ditinjau dari banyaknya sumber daya yang dimiliki dan pengelolaan yang optimal Andraz *et al.* (2015). Di mana hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu daerah.

Kinerja keuangan suatu daerah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Kinerja keuangan suatu daerah

yang baik dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat (Khairudin *et al.* 2020). Menurut Undang-Undang RI No 11 tahun 2019 bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Kinerja keuangan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan alat indikator untuk mengukur pembangunan manusia menurut tiga komponen kemampuan dasar manusia yaitu: derajat kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai karena keputusan pemerintah publik dilaksanakan dalam peran alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang dimiliki (Minassian dalam Blanchard & Shleifer, 2000). Sumber daya ekonomi dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan agar masyarakat memiliki kemampuan berinovasi. Kemampuan inovasi yang dimiliki dapat membuat masyarakat memiliki peluang usaha dan peluang kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup, baik untuk tingkat pendidikan dan kesehatan (Putri & Badrudin. 2017). Selain itu, pada sisi lain peluang kerja yang dimiliki masyarakat akan berdampak pada konsep tabungan, nilai ekonomi fertilitas, nilai ekonomi perkawinan dan perceraian (Bryant 1990 dalam Sunarti 2006).

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Aisha *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa sektor pariwisata berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Widyastuti (2013) mengungkapkan bahwa keberhasilan pengembangan sektor

kepariwisataan akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan daerah. Nasution & Panggabean (2017) menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mardianis & Syartika (2018) menunjukkan sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan dalam mendukung perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi pariwisata terhadap PAD pada periode penelitian hanya 0.57% atau relatif tidak berperan.

Penelitian terkait pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan Habibi *et al.* (2018) mengungkapkan dampak pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif, dengan demikian dampak pariwisata secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum. Rivera (2017) menunjukkan kausalitas searah yang mendukung pertumbuhan pariwisata yang digerakkan oleh ekonomi, yang berarti bahwa pertumbuhan pariwisata adalah produk pertumbuhan ekonomi tetapi tidak sebaliknya. Sedangkan penelitian Croes *et al.* (2018) spesialisasi pariwisata tidak memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, masukan seperti keterampilan manajerial dan kualitas lembaga yang tidak teramati, mungkin memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ekspansi pariwisata. Lebih lanjut Croes *et al.* 2021 menunjukkan bahwa spesialisasi pariwisata hanya memiliki efek langsung jangka pendek positif yang signifikan. Namun pola jangka panjang atau tren menunjukkan bahwa pariwisata tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Nurhayati & Hamzah (2020)., Aisha *et al.* (2018)., Nasution & Panggabean (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi maka akan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan hasil penelitian Heryanti (2019) menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak selalu diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Hamid (2018) bahwa terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap pendapatan perkapita, usia harapan hidup dan lama sekolah. Widiastuti (2013)., Mangantar (2018)., Sudiarta & Utama (2019) menunjukkan kinerja keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, kinerja keuangan yang baik akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya kemandirian keuangan daerah yang dibarengi meningkatnya pengeluaran pemerintah pada belanja publik. Sedangkan Khairudin *et al.* 2019 menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat belum begitu baik. Hiktoap *et al.* (2020) menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan hasil penelitian terkait hal-hal mengenai sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian mengenai sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan variabel mediasi yang berbeda-beda. Croes (2021) hasil penelitian menunjukkan hanya ada hubungan yang lemah antara sektor pariwisata dan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi merupakan saluran yang mendukung perluasan pembangunan manusia, sehingga sektor pariwisata memiliki efek tidak langsung terhadap pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Widyastuti (2013) pengembangan sektor

pariwisata akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan daerah, Kinerja keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sektor pariwisata berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
2. Apakah sektor pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
4. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah?
6. Apakah kinerja keuangan daerah memediasi pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis hal-hal berikut:

1. Pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah.
4. Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi memediasi sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah.
6. Pengaruh kinerja keuangan daerah memediasi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Bagi masyarakat: memberikan kontribusi keilmuan khususnya ilmu akuntansi sektor publik terkait sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat serta model penelitian yang dikembangkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi akademisi: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi teoritis dan empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama terhadap fenomena terkait sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah memberikan masukan kepada pihak terkait khususnya dinas pariwisata dalam hal penyusunan kebijakan dan diharapkan dapat menjadi acuan atau dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata.
- b. Bagi peneliti selanjutnya model penelitian yang dikembangkan oleh peneliti dapat menginspirasi semua pihak untuk mengembangkan model yang lebih baik dan sebagai referensi atau rujukan akademisi atau paneliti untuk penelitian mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah kabupaten Bulukumba yang berlokasi di Bulukumba, Sulawesi Selatan, 90651. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Bulukumba dikarenakan Bulukumba memiliki banyak destinasi wisata, dimana hal tersebut sesuai dengan topik penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun gambaran garis besar dari penulisan ini sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian terdiri atas, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis; ruang lingkup penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan teori dan konsep; dan tinjauan empiris.

BAB III RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Berisi rerangka konseptual dan hipotesis

BAB IV METODE PENELITIAN

Berisi rancangan penelitian; situs dan waktu penelitian; populasi, sampel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; variabel penelitian dan definisi operasional; instrument penelitian; dan teknik analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN

Memuat deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian

BAB VI PEMBAHASAN

Menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

2.1.1 Teori

2.1.1.1 Teori Keynes

John Maynard Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General of Employment, Interest and Money* tahun 1936 berpendapat bahwa pengeluaran agregat yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu Negara. Keynes menciptakan pendekatan baru dalam analisis ekonomi yaitu menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan.

Menurut pandangan Keynes, tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat yang akan wujud dalam suatu perekonomian dapat dibedakan kepada empat komponen yaitu: konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Keempat komponen pengeluaran merupakan *magnitude* (nilai pengeluaran) yang akan menentukan kegiatan perekonomian, kesempatan kerja dan pendapatan nasional (Sukirno, 2013:101). Menurut pandangan Keynes pengeluaran konsumsi yang dilakukan sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dengan jumlah pendapatan disebut kecondongan mengkomsumsi ($MPC = Marginal Propensity to Consume$). Semakin besar MPC semakin besar pula pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sebaliknya.

Pemerintah yang dalam kegiatannya akan menggunakan barang dan jasa dengan berbagai bentuk diharapkan dapat memenuhi tujuan dan keinginan masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah bertujuan agar roda perekonomian tetap berjalan. Belanja daerah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara (Sukirno. 2006), maka jika dikaitkan dengan realisasi APBD, semakin besar realisasi APBD maka semakin besar juga dampaknya terhadap kesejahteraan suatu daerah.

Pandangan pokok teori makro ekonomi Keynesian atau *Keynesian macroeconomic*, meliputi tiga aspek: (a) peranan pengeluaran agregat, (b) penentuan suku bunga dan peranan uang, dan (c) peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2013: 231).

Hubungan antara teori dengan penelitian ini dimana teori Keynes didasarkan atas siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Dampak akibat adanya pariwisata terhadap perekonomian muncul sebagai akibat dari adanya penawaran dan permintaan dalam industri pariwisata, hal ini disebabkan oleh munculnya pola pengeluaran dari pengunjung wisata, dan investasi dihasilkan oleh adanya transaksi pariwisata sehingga akan menimbulkan adanya perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama sehingga jika seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Dampak ekonomi kegiatan

pariwisata biasanya terfokus pada perubahan dalam penjualan, pendapatan dan lapangan kerja di daerah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Konsep Keynes dalam perekonomian melibatkan campur tangan pemerintah agar pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, agar kegiatan perekonomian terjamin berada pada jalur yang tepat maka otoritas yang berwenang mengendalikan dan mengatur perekonomian adalah pemerintah.

2.1.2 Kinerja keuangan Daerah

Menurut UU nomor 23 tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Dan apabila pencapaian melebihi apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Dan apabila tidak sesuai dengan apa yang direncanakan maka kinerjanya jelek.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Pengukuran kinerja dan indikator merupakan bagian dari proses manajemen strategis (Jackson & Palmer, 1992:120). Oleh karena itu, sebagai

suatu elemen manajerial, kinerja merupakan kunci sukses. Keputusan strategis disusun melalui kebijakan untuk mencapai sasaran dan target yang diinginkan. Pencapaian sasaran dan target membutuhkan informasi tentang aktual kinerja yang diharapkan dengan membandingkan kebijakan yang ditetapkan (*setting objectives*). Informasi yang diharapkan harus tersusun dan merupakan desain pengukuran kinerja dan indikator yang terurai dan jelas.

Ada beberapa pemikiran untuk membangun organisasi pemerintah daerah melalui pengukuran kinerja setiap aktivitas kegiatannya baik rutin dan pembangunan, dari sektor pelayanan sampai dengan proyek. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan, sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Menurut Halim (2002: 216) analisis kinerja adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199). Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah daerah tidak

hanya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk tiga tujuan (Mardiasmo, 2002: 121) yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan dan mewujudkan pertanggung jawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Menurut Prabowo (1999: 149) sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990: 96). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986: 99).

1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan dalam kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan peraturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain faktor alam, tenaga kerja, dan teknologi, maka sala satu faktor utama lainnya adalah faktor kapital yang biasa disebut sumber daya modal (*capital*

resources). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah merupakan sumber modal yang dihimpun dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah (Soediyono, 1992: 137).

Selanjutnya Davery (1988: 258) mengungkapkan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

A. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat ukur menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersil, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169).

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007: 233) yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja. Adapun

pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim, 2007: 232) adalah:

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja. Untuk itu, penjelasan terkait dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja.

1. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total pendapatan dalam satuan persen (Halim, 2002: 128).

Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan kemampuan dari PAD. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2002: 128) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Paul Harsey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002: 168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.
3. Pola hubungan partisipasif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonom.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2.1 (Halim. 2002: 189).

Tabel 2.1

Pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0 -25	Intruktif

Rendah	>25-50	Konsultif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2006

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

2. Rasio Efektivitas

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dalam satuan persen. Rasio efektivitas diukur dengan: (Suyana, 2008: 33):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Mahsun, 2006: 187).

Tabel 2.2
Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup efektif	>80-90
Kurang efektif	>60-80
Tidak efektif	<60

Sumber: Mahsun, 2006

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satuan persen (Suyana, 2008: 30). Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Mahsum, 2006: 187).

Rasio efisiensi diukur dengan (Suyana, 2008: 33) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi

tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Mahsun, 2006: 187).

Tabel 2.3
Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	≤60
Efisien	>60-80
Cukup efisien	>80-90
Kurang efisien	>90-100
Tidak efisien	≥100

Sumber: Mahsun, 2006

Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut (Budiarto, 2007: 112).

- a. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan;
- b. Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan, baik itu struktural maupun organisasi;
- c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan;
- d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat;
- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja

pelayanan publik secara optimal. Dalam penelitian ini digunakan proporsi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana, 2008: 36).

Secara sederhana rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut (Suyana, 2008: 36) :

Rasio Keserasian Belanja

$$= \frac{\text{Belanja Aparatur \& Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut (Mahsun, 2006: 187)

Tabel 2.4
Keserasian Belanja Keuangan Daerah

Keserasian Belanja Keuangan Daerah Otonomi	Rasio Keserasian Belanja (%)
Tidak serasi	0-20
Kurang serasi	>20-40
Cukup serasi	>40-60
Serasi	>60-80
Sangat serasi	>80-100

Sumber: Mahsun, 2006

2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang RI No 11 tahun 2009, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga

Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial mencakup usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu dibidang fisik, mental, emisional, sosial, ekonomi dan spiritual. Selain itu kesejahteraan sosial sebagai kesehatan jiwa yang dapat dilihat dari empat sudut yaitu keadaan, ilmu, kegiatan dan gerakan (Sumarsono *et al.* 2017: 34).

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak. Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran, juga dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (penduduk) sebagai objek pembangunan. Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks pembangunan manusia merupakan alat indikator untuk mengukur pembangunan manusia walaupun tidak semua aspek pembangunan manusia dapat diukur melalui perhitungan IPM mengingat sangat luasnya dimensi pembangunan manusia, tetapi paling tidak IPM dapat menggambarkan hasil

pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan manusia yang sangat mendasar yaitu: derajat kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat. Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, program pembangunan PBB (UNDP) melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan perkapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI).

Alat ukur ini telah digunakan baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam melihat hasil-hasil pembangunan masing-masing provinsi atau Negara. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota. Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan "*Human Development Index*" (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan diatas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari itu sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Demi memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM.

Pendapatan perkapita adalah PDRB berdasarkan harga konstan yang berlaku di masyarakat dibagi dengan total penduduk pada pertengahan tahun, dalam satuan rupiah. PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian dalam kurun waktu satu tahun. Tingkat pendidikan masyarakat diukur dari jumlah penduduk yang menamatkan bangku pendidikan formal terhadap total penduduk disuatu wilayah tertentu, dalam satuan persen. Usia harapan hidup adalah rata-rata umur masyarakat yang dicapai pada suatu wilayah tertentu, dalam satuan tahun.

2.1.4 Pariwisata

2.1.4.1 Konsep Dasar Pariwisata

Defenisi pariwisata yang berkembang sangat beragam, defenisi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: (1) pariwisata dilihat dari posisi *demand* merupakan defenisi pariwisata dari sisi wisatawan yang kental dengan dimensi spasi yakni jarak dan waktu; (2) pariwisata dilihat dari posisi *supply* merupakan defenisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri atau bisnis; (3) penggabungan antara *demand* dan *supply* merupakan pariwisata dipandang dari dimensi akademis dan sosial Budaya. (Utama, 2014: 15).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- e. Daya tarik wisatawan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- g. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
- h. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- i. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- j. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

2.1.4.2 Klasifikasi Pariwisata

1. Pariwisata Berdasarkan Letak Geografis

a. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)

Pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya pariwisata kota Bandung, Makassar.

b. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Pariwisata yang berkembang disuatu tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas bila dibandingkan dengan pariwisata lokal, tetapi lebih sempit bila dibandingkan dengan *national tourism*. Misalnya Pariwisata Sumatera Utara, Bali.

c. Pariwisata Nasional (*National Tourism*)

Pariwisata nasional dalam arti sempit kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu Negara. Pengertian ini sama halnya dengan “pariwisata dalam negeri” atau *domestic tourism*, dimana titik beratnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga Negara itu sendiri dan warga asing yang berdomisili di Negara tersebut. Pariwisata nasional dalam arti luas, kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu Negara, selain kegiatan *domestic tourism* juga dikembangkan *foreign tourism* dimana di dalamnya termasuk *inbound tourism* dan *out going tourism*, jadi selain adanya lalu lintas wisatawan di

dalam negeri sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri maupun dari dalam negeri ke luar negeri.

d. *Regional Internasional Tourism*

Kegiatan pariwisata yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga Negara dalam wilayah tersebut. Misalnya pariwisata kawasan ASEAN, Timur Tengah.

e. *Internasional Tourism*

Kegiatan pariwisata yang berkembang di seluruh Negara di dunia termasuk *regional-internasional tourism* dan *national tourism*.

2. Pariwisata Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Neraca Pembayaran

a. Pariwisata aktif atau *In tourism*

Kegiatan pariwisata yang ditandai dengan fenomena masuknya wisatawan asing ke suatu Negara tertentu. Dikatakan sebagai pariwisata aktif karena dengan masuknya wisatawan asing tersebut, berarti dapat memasukkan devisa bagi Negara yang dikunjungi yang tentunya secara otomatis akan memperkuat posisi neraca pembayaran Negara yang dikunjungi wisatawan tersebut. Bila ditinjau dari segi pemasukan devisa maka jenis pariwisata ini harus mendapat perhatian utama untuk dikembangkan, karena sifatnya yang *quick yielding* tersebut.

b. Pariwisata pasif atau *Out-going tourism*

Kegiatan pariwisata yang ditandai dengan fenomena keluarnya warga negara sendiri yang bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Dikatakan sebagai pariwisata pasif karena bila ditinjau dari segi pemasukan devisa bagi Negara. Kegiatan ini merugikan Negara asal wisatawan karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri di

bawah ke luar negeri dan tidak ada arti ekonominya bagi Negara tersebut. Oleh karena itu, jarang sekali ada Negara yang berkeinginan untuk mengembangkan pariwisata jenis ini. Namun, bila tidak ada *out-going tourism* apakah mungkin ada *tourism*?

3. Pariwisata Menurut Alasan/Tujuan Pariwisata

a. *Business Tourism*

Jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaan, *meeting, insentif, conversion, exhibition* (MICE).

b. *Vacational Tourism*

Jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur atau memanfaatkan waktu luang.

c. *Educational Tourism*

Jenis pariwisata dimana pengunjung melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari sesuatu di bidang ilmu pengetahuan. *Educational tourism* meliputi *study tour* atau darmawisata. Dalam bidang bahasa dikenal istilah *poly plotisch*, yaitu orang-orang yang tinggal sementara waktu di suatu Negara untuk mempelajari bahasa Negara tersebut.

4. Jenis dan Macam Pariwisata Menurut Saat atau Waktu Berkunjung

a. *Seasonal Tourism*

Jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah sumber *tourism* atau *winter tourism* yang biasanya ditandai dengan kegiatan olahraga.

b. *Occasional Tourism*

Jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (*occasional*) maupun event. Misalnya Galunggung dan Kuningan di Bali, Sekaten di Yogyakarta, Cherry Blossom Festival di Tokyo.

5. Pariwisata Menurut Objeknya

a. *Cultural Tourism*

Jenis pariwisata dimana perjalanan dilakukan karena adanya motivasi untuk melihat daya tarik dari seni-budaya suatu tempat atau daerah. Objek kunjungannya adalah warisan nenek moyang dan benda-benda kuno. Seringkali terbuka kesempatan bagi wisatawan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan di tempat yang dikunjunginya.

b. *Recuperational Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan wisatawan melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit. Seperti halnya mandi di sumber air panas, mandi lumpur yang biasa dijumpai di Eropa, serta mandi kopi di Jepang yang diyakini dapat membuat wajah terlihat awet muda.

c. *Commercial Tourism*

Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, dimana sering diadakan di expo, fair, exhibition.

d. *Sport Tourism*

Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olahraga. Orang-orang yang melakukan perjalanan bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu event olahraga di suatu tempat atau Negara (dapat juga ikut

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut). Misalnya Olimpiade, All England, Pertandingan Tinju.

e. *Political Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanan yang tujuannya untuk melihat atau menyaksikan suatu pariwisata yang berhubungan dengan kegiatan suatu Negara. Misalnya kemerdekaan suatu Negara (Parade 1 Oktober di Rusia).

f. *Social Tourism*

Pariwisata sosial jangan disosialisasikan sebagai suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraannya saja yang tidak menekankan pada usaha untuk mencari keuntungan. Misalnya *study tour*, *youth tourism* yang dikenal istilah pariwisata remaja.

g. *Religion Tourism*

Jenis pariwisata dimana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. Seperti halnya ibadah Haji atau Umrah ke Mekah bagi penganut agama islam, kunjungan ke Lourdes bagi penganut agama Katolik, dan lain lain.

6. Pariwisata Menurut Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan

a. *Individual Tourism*

Disini yang melakukan perjalanan wisata adalah seorang wisatawan secara mandiri (seorang diri) atau satu keluarga yang berwisata bersama.

b. *Group Tourism*

Jenis wisatawan dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu rombongan atau

kelompok (*group*) yang biasanya diorganisir oleh suatu pihak tertentu, misalnya *tour operator* atau *travel agent*.

7. Pariwisata Menurut Alat Transportasi yang digunakan

a. *Land Tourism*

Jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan kendaraan mobil pribadi, bus atau kereta api. Perjalanan dari dan ke daerah tujuan menggunakan pengangkutan darat.

b. *Sea and River Tourism*

Kegiatan pariwisata yang menggunakan kapal laut untuk berpesiar atau mengunjungi tempat-tempat destinasi wisata.

c. *Air Tourism*

Jenis pariwisata yang menggunakan pengangkutan udara (pesawat terbang) dari dan ke daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi.

8. Jenis dan Macam Pariwisata Menurut Usia Wisatawan

a. *Youth Tourism*

Jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang senang melakukan perjalanan wisata dengan harga relatif murah dan biasanya menggunakan akomodasi *Youth Hostel*.

b. *Adult Tourism*

Kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya orang-orang yang melakukan perjalanan ini adalah orang-orang yang sedang menjalani masa pensiunnya dan ingin menghabiskan masa tua mereka dengan pergi berwisata ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya.

9. Pariwisata Menurut Jenis Kelamin

a. *Masculine Tourism*

Jenis pariwisata yang kegiatannya hanya diikuti oleh kaum pria saja. Seperti safari hunting adventure yang sering dilakukan di Afrika.

b. *Femineme Tourism*

Jenis pariwisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita saja, misalnya tour yang diselenggarakan khusus untuk menyaksikan demonstrasi kecantikan, memasak, menghias.

10. Pariwisata Menurut Harga dan Tingkat Sosial

a. *Delux tourism*

Perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar lux, baik itu alat transportasi, hotel, maupun atraksi yang akan disaksikannya.

b. *Middle Class Tourism*

Perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga yang tidak terlalu mahal, tetapi juga tidak terlalu jelek pelayanannya.

c. *Social Tourism*

Jenis pariwisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas yang cukup memadai selama berada dalam perjalanan.

2.1.4.3 Pariwisata dalam Perekonomian

Pertumbuhan yang berimbang bagi perekonomian dapat terjadi sebagai akibat majunya industri pariwisata yang dikembangkan dengan baik (Spillane). Schubert, (2011) dan Habibi *et al.* (2018) pariwisata memberikan keuntungan dalam mengatasi wilayah suatu Negara dengan tiga cara, yaitu:

1. Memberikan volume untuk mengatasi permintaan pasar yang tidak mencukupi yang memungkinkan efisiensi yang lebih besar dan

menyediakan skala ekonomi lebih banyak barang dan jasa yang mengurangi biaya unit produksi.

2. Meningkatkan persaingan dengan mendorong pendatang baru di pasar, yang memberikan dampak positif pada tingkat harga barang dan jasa.
3. Pariwisata dengan menyediakan skala dan persaingan bersama dengan pilihan konsumen yang lebih besar dan keterbukaan perdagangan, dapat meningkatkan kualitas kehidupan di wilayah suatu Negara.

Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia adalah: (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (ii) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (iii) menghapus kemiskinan, (iv) mengatasi pengangguran, (v) melestarikan alam, (vi) memajukan kebudayaan, (vii) mengangkat citra bangsa, (viii) memupuk rasa cinta tanah air, (ix) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, (x) mempererat persahabatan antar bangsa.

Menurut Ismayanti dalam Ulhusna (2017) beberapa keuntungan dari pariwisata terhadap ekonomi sebagai berikut: (i) kontribusi pariwisata dalam devisa Negara, (ii) menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, (iii) menghasilkan lapangan pekerjaan, (iv) meningkatkan sektor ekonomi, (v) membuka peluang investasi, (vi) mendorong aktivitas wirausaha.

Dalam pengembangan produk wisata yang ada, memaksimalkan pasar wisata serta potensi lain yang mendukung strategi tersebut dengan cara mengembangkan destinasi pariwisata dengan prinsip berkelanjutan dari aspek lingkungan, sosio kultural, serta mudah dicapai dan menarik bagi wisatawan. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang dapat meningkatkan kunjungan

wisatawan, mengembangkan organisasi, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien (Badarab *et al.* 2017).

Fretes *et al.* (2013) Untuk mengembangkan kawasan wisata akan menggunakan strategi pengembangan produk, maka diperoleh atau dilakukan dengan program-program sebagai berikut:

1. Perluasan akses dan peningkatan kualitas pariwisata melalui kegiatan:
(i) pendataan potensi wisata, (ii) pengembangan potensi pariwisata, (iii) peningkatan potensi pariwisata, (iv) peningkatan infrastruktur.
2. Peningkatan kualitas SDM.
3. Peningkatan atau penguatan sistem manajemen.

Faktor-faktor yang mendukung pengembangan yang baik bagi suatu objek wisata akan dapat menentukan kelayakan teknis dalam pengembangan suatu objek wisata. Faktor-faktor itu terdiri dari adanya faktor internal yang meliputi daya tarik objek, pengelolaan, perawatan dan pelayanan, tersedianya air bersih. Untuk faktor eksternal meliputi potensi pasar, kadar hubungan. Kondisi lingkungan, kondisi alam, akomodasi, sarana dan prasarana penunjang serta hubungan dengan objek wisata lain. (Fretes *et al.* 2013).

2.1.4.4 Industri Pariwisata

Pariwisata sebagai industri jasa yang digolongkan sebagai industri ketiga (*tertiary industry*) cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan kesempatan kerja (Spillane, 1991). Udayantini *et al.* (2015) pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui kegiatan pariwisata yang dihitung dalam satuan rupiah.

Konsep pengembangan wisata secara spasial dan non spasial. Adapun konsep spasialnya dengan menyediakan rute perjalanan wisata, menyediakan

sarana transportasi khusus menuju kawasan wisata dan menyediakan fasilitas pendukung kegiatan wisata. Sedangkan konsep non spasialnya dengan menjadikan adat istiadat sebagai peraturan dalam kegiatan wisata, mengembangkan kawasan wisata, menyediakan fasilitas penginapan, menyediakan toko souvenir, menyediakan fasilitas rumah makan, memberikan pelatihan kepada masyarakat, menyediakan tempat rekreasi, membuat web tentang kawasan wisata, melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan menerapkan peraturan zonasi (Zakaria & Surihardjo, 2014). Pembuatan kawasan wisata akan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada wisatawan, dapat lebih menonjolkan potensi khas yang dimiliki berupa potensi sumber daya alam dan tradisi, memudahkan usaha pelestarian mencegah eksploitasi dan kerusakan lingkungan yang berlebihan serta memudahkan pengelolaannya (Nugroho *et al.* 2015).

Kegiatan wisatawan memicu munculnya kegiatan ekonomi. Wisatawan harus membayar kebutuhan *to do*, *to see*, dan *to buy*-nya. Dalam kacamata ekonomi, maka aktivitas tersebut memunculkan permintaan dan penawaran produk pariwisata. Sisi permintaan merupakan preferensi wisatawan akan produk pariwisata yang ditawarkan oleh industri pariwisata. Produk pariwisata diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Namun demikian, perusahaan-perusahaan tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya. Meskipun produk yang dihasilkan secara terpisah, namun penawaran produk tersebut tergabung menjadi satu produk pariwisata yang biasa disebut paket wisata (Wahyuni, 2018).

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam

masyarakat bertambah (Sukirno, 2013: 9). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menunjukkan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksi dalam masyarakat meningkat (Arifin & Soesatyo, 2020:19).

Pertumbuhan perekonomian kegiatan ekonomi yang belaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan perekonomian menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan riil suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan riil tahun sebelumnya. Salah satu kegunaan penting dari data pendapatan adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan ekspansi dalam perekonomian suatu Negara yang dapat diukur dengan menggunakan beberapa pendekatan dan yang lain sering digunakan adalah Produk Domestik Bruto (Arifin & Soesatyo :17).

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun (Faried & Sembiring, 2019: 85). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain: (i) sumber daya alam, (ii) Jumlah dan mutu pendidikan penduduk, (iii) ilmu pengetahuan dan teknologi, (iv) sistem sosial, (v) pasar (Faried & Sembiring, 2019: 87).

Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung dihitung dari data yang tersedia:

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100$$

- (i) Menghitung pendapatan nasional riil dengan mendefleksikan pendapatan nasional pada harga masa kini.

Keterangan:

G = pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persen

PDRB₁ = PDRB riil periode tahun t.

PDRB₀ = PDRB periode tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator untuk menilai perekonomian sebuah daerah/bangsa/Negara. Atas dasar tersebut maka setiap Negara berusaha untuk meningkatkan angka ekonomi dengan cara salah satunya adalah investasi pada sektor infrastruktur, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan infrastruktur akan mempermudah mobilitas arus barang dan jasa dari dan ke suatu tempat sehingga meningkatkan produktivitas. Produktivitas dinilai dari banyaknya jumlah output barang dan jasa yang akan meningkatkan produk domestik regional bruto (Seran, 2016: 113).

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.5
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Rivera. 2017	The synergies between human development, economic growth, and tourism within a developing country: An empirical model for Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> a. pariwisata tidak mendorong pembangunan manusia. Sebaliknya tingkat dan ukuran manusia yang mendorong pariwisata dan menciptakan hubungan yang timpang. b. Siklus yang baik antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. c. Kausalitas searah yang mendukung pertumbuhan pariwisata yang digerakkan oleh ekonomi, yang berarti bahwa pertumbuhan pariwisata adalah produk pertumbuhan ekonomi tetapi tidak sebaliknya.

2	Habibi <i>et al.</i> 2018	Contribution of tourism to Economic growth in Iran	Dampak pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Dampak pariwisata secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum.
3	Croes <i>et al.</i> 2021	Tourism specialization, economic growth, human development, and transition economic: The case of Poland	<ul style="list-style-type: none"> a. Spesialisasi pariwisata hanya memiliki efek langsung jangka pendek positif yang signifikan. Namun pola jangka panjang atau tren menunjukkan bahwa pariwisata tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. b. Spesialisasi pariwisata memiliki efek jangka pendek pada pertumbuhan ekonomi dan hubungan negative tidak langsung dengan pembangunan manusia. c. Pertumbuhan ekonomi tampaknya merupakan saluran yang mendukung perluasan pembangunan manusia, yang mengidentifikasi efek positif jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan. d. Modal manusia menunjukkan pola bentuk U dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.
	Croes <i>et al.</i> 2018	Connecting Quality of life, tourism specialization, and economic growth in small Island destinations: The case of Malta	<ul style="list-style-type: none"> a. Spesialisasi pariwisata tidak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Masukan seperti keterampilan manajerial dan kualitas lembaga yang tidak teramati, mungkin memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ekspansi pariwisata. b. Interaksi antara spesialisasi pariwisata, investasi dan modal manusia adalah negative, menyiratkan bahwa efek marginal dari investasi dalam produk pariwisata dapat menghasilkan pengembalian yang rendah, sementara produk pariwisata menderita pembusukan produktivitas disektor tersebut. c. Spesialisasi pariwisata menunjukkan tanda-tanda pengembalian yang semakin berkurang dari waktu ke waktu dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi. d. Spesialisasi pariwisata memiliki hubungan yang diselesaikan dengan kualitas hidup untuk Malta signifikan dalam jangka pendek dan menyiratkan peningkatan pengembalian dalam jangka panjang.
4	Wardhana <i>et, al.</i> 2019	Dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi (TLG Hipotesis, Studi Kasus: 8 Negara Asean	Indikator investasi modal, jumlah tenaga kerja memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan indikator ekspor tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator penerimaan pariwisata internasional dan investasi modal pariwisata mempengaruhi secara signifikan dan searah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor pariwisata agar lebih meningkat, maka diperlukan modal pariwisata yang cukup

			besar sehingga akan berdampak terhadap pada pertumbuhan ekonomi yang positif.
6.	Aisha, D. L., Wiratno, A., & Widianingsih, R. (2018).	Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 2. Pendapatan sektor pariwisata berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 4. Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7.	Soritua, Y. (2017).	ANALISIS PERAN SEKTOR PARIWISATA MENJADI PENDAPATAN UTAMA DAERAH (Studi Banding: Peran Sektor Pariwisata di Provinsi Bali).	Disimpulkan bahwa sektor Pariwisata Bali dapat menjadi sumber Pendapatan Utama Daerah. Bali memiliki sektor pariwisata yang sangat baik hal ini dikarenakan keindahan alam, budaya, dan tradisi yang dimiliki provinsi Bali sendiri. Kontribusi PDRB yang tinggi melalui sektor pendukung karena adanya sektor pariwisata seperti perdagangan, hotel dan restoran, membuat Bali menjadikan sektor Pariwisata sebagai faktor utama pendapatan daerah. Pemerintah melakukan pengembangan sektor Pariwisata untuk meningkatkan kinerja sektor Pariwisata dalam peningkatan pendapatan utama daerah. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah provinsi Bali mempunyai sektor yang sangat kuat yaitu sektor pariwisata yang dapat dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat tinggi, lalu kontribusi sektor yang terkena imbas perkembangan pariwisata terhadap PDRB di Provinsi Bali.
8.	Widiastuti, N. K. (2013)..	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001–2010. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dicerminkan oleh rasio kinerja pemungutan pendapatan asli daerah (<i>fiscal effort</i>), rasio kemandirian keuangan daerah serta rasio keserasian belanja. Kinerja keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat

			dilihat dari meningkatnya kemandirian keuangan daerah yang dibarengi meningkatnya pengeluaran pemerintah pada belanja publik. Dampak langsung perkembangan pariwisata menyebabkan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB sehingga menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya pendidikan masyarakat dan meningkatnya harapan hidup di Provinsi Bali. Melalui analisis jalur diketahui sektor pariwisata secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah, yaitu sebesar 0,3 kali pengaruh langsung sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.
9.	Berliani, K. (2016).	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka.	Kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan berpengaruh positif parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten Majalengka.
10.	Nasution & Panggabean (2018).	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin baik pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Secara teori pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu: Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan tingkat potensi daerah dan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelayanan pembangunan maka semakin baik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
11.	Hamid 2018	Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap	1. terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap pendapatan perkapita

		tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten majalengka	2. terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap angka usia harapan hidup 3. terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap lama sekolah
12.	Sudiarta & Utama 2019	The effect of regional financial performance on inclusive growth and community welfare in regency city of Bali Province.	Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat kabupaten (kota) di provinsi Bali 2012-2017. Dan pertumbuhan ekonomi inklusif secara statistik memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat.
13.	Mangantar 2018	An Analisis of the government financial performance influence on community welfare in north Sulawesi province Indonesia.	Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan asli daerah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
14.	Sudarmayasa & Nala	Dampak keberadaan sektor pariwisata terhadap peningkatan faktor sosial ekonomi masyarakat kampung tenun Samarinda di kota Samarinda Kalimantan Timur	Bahwa terdapat sinergi antara keberadaan sektor pariwisata untuk meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah tujuan wisata Dampak pariwisata secara langsung atau tidak langsung sudah mengubah kehidupan masyarakat pemilik destinasi ke arah yang lebih baik. Dari kehidupan perekonomian dampak yang dirasakan hal ini di buktikan dengan banyaknya keluarga yang menempuh pendidikan tinggi dan memiliki kehidupan yang layak. Dari dampak sosial masyarakat mengalami perkembangan secara perekonomian yang mana masyarakat mendukung keberadaan daya Tarik wisata serta terjaganya pola kehidupan kebudayaan dan adat istiadat daerah setempat. Apalagi didukung oleh kebijakan pemerintah setempat.